

Pada akhirnya, tema multikulturalisme adalah tema yang akan selalu menetap dalam pembicaraan suatu bangsa yang majemuk, termasuk Indonesia. Dengan demikian siapapun yang berani tampil sebagai pemimpin dibangsa ini tidak boleh gagap dalam percakapan multikultur. Lebih daripada itu, menjadi pemimpin di negeri ini sudah barang tentu mensyaratkan kualitas seorang pemimpin yang berwawasan multikultur.

Daftar Pustaka

- Adhanta, Verdi. (2007). Kata dan Makna. *Jurnal Perempuan: Merayakan Keberagaman. No.54/2007, hal 117-123*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan
- Budiman, Manneke. (2007). Wawancara dengan Manneke Budiman. *Jurnal Perempuan: Merayakan Keberagaman. No.54/2007, hal 104-108*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan
- Gerung, Rocky. 2008. *Humaniora dan Arah Kebudayaan Kita*. Depok: FIB-UI
- Kymlicka, Will. 2002. *Kewargaan Multikultural*. Diterjemahkan E.H Eddin. Jakarta: LP3ES
- Liliweri, Alo. 2005. *Prasangka dan Konflik*. Yogyakarta: LKiS
- Magniz-Suseno, Franz. 2000. *20 Tokoh Etika abad ke-20*. Yogyakarta: Kanisius
- _____. 2005. *Pijar-pijar Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius
- Nasution, Irfan & Agustinus, Ronny (penyunting). 2006. *Restorasi Pancasila, Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas (Prosiding Simposium Peringatan Hari Lahir Pancasila, Kampus FISIP UI, Depok, 31 Mei, 2006)*. Bogor: Brighten Institute
- Pramudya, Wildan. 2010. *Gus Dur sebagai Orang Asing*. Kompas 9 Januari. hal 6
- Robet, Robertus. 2007. *Republikanisme dan Keindonesiaan: Sebuah Pengantar*. Serpong: Margin Kiri
- Rorty, Richard. 1989. *Contingency, Irony and Solidarity*. Cambridge: Cambridge University Press
- Sen, Amartya. 2006. *Identity and Violence*. New York: W.W. Norton

KAJIAN TEMA

**Dari *Standing For* Kepada *Acting For*:
Kajian Etika Feminis Atas Peran Gereja dan Perempuan Pemimpin
di Indonesia**

Irene Ludji

Abstract

This paper use feminist ethics as an approach to understand the role of the church and women leadership in Indonesia. The member of the church, including women and men, must strive to become an ecumenical, confessional and missional church who are standing for and acting for humanity. The church must refrain from performing their role exclusively in ritual and ceremonial mere. Indonesian women with their quality and capability to be powerful leaders, as proved in Indonesian history, must strive to change their role from descriptive to substantial in order to be leader in public spheres. The church and women are moral agents created in the image of God with responsibility to represents the minority in national leadership.

Keywords: *Women, Leadership, Church, Standing For, Acting For*

Pendahuluan

Perempuan Indonesia adalah perempuan dengan kualitas dan kapasitas kepemimpinan yang tidak perlu diragukan. "Sejarah membuktikan bahwa kuasa kepemimpinan perempuan sudah ada sejak berabad-abad silam. Dalam bentangan laut Nusantara, kepemimpinan perempuan selalu dapat dijumpai. Kuasa perempuan dalam ranah politik bahkan tidak hanya pada tataran realitas (sejarah), namun juga diceritakan dalam banyak kisah, mitos dan sastra klasik."¹ Gaya kepemimpinan perempuan bercirikan kesejahteraan dan kedamaian bagi rakyat/pengikutnya.² Sayangnya kepemimpinan perempuan masih kurang nampak (dan seringkali tidak diakui) dalam kehidupan bersama di Indonesia, termasuk di bidang politik. Harus diakui bahwa sudah mulai nampak perubahan peran perempuan yang awalnya hanya menjadi *vote getter* kepada perempuan sebagai wakil dengan berbagai fungsi di aras kepemimpinan nasional. Perempuan perlu berpolitik, karena perempuan yang berpolitik akan mampu mengembangkan agenda politik yang

berbasis dan bermuara pada pemberdayaan perempuan. Dalam dunia politik, jelas bahwa ada dilema antara kepentingan *critical mass* perempuan dengan jaminan bahwa keterlibatan perempuan pasti dapat melahirkan perubahan dalam proses pengambilan keputusan yang berbasis kepentingan di aras nasional. Tetapi setidaknya keterwakilan perempuan, yang minimal 30 % sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Pemilu dan diberlakukan sejak 2004, adalah *entry point* bagi peran yang lebih substansial dari perempuan dalam kepemimpinan nasional.

Di dalam mendialogkan peran perempuan di dalam kepemimpinan nasional, tulisan ini hendak mengkaji peran perempuan pemimpin³ dan gereja. Gereja dalam konteks ini bukan sekedar institusi keagamaan⁴, gereja juga adalah orangnya/jemaatnya/warganya. Umat percaya yang mengaku beriman kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Juruselamat bergabung di dalam sebuah persekutuan akbar yang disebut gereja. Umat percaya ini terdiri atas berbagai kategori: perempuan dan laki-laki, anak-anak remaja dewasa, lansia, dan lain-lain. Gereja terdiri atas individu beriman yang juga adalah warga Negara Indonesia. Oleh karenanya gereja memiliki tanggungjawab politik dalam pergerakan bangsa ini. Pertanyaannya adalah dimana posisi gereja saat ini? Bagaimana gereja dapat menjadi peserta yang aktif dalam perubahan kepemimpinan nasional? Di titik ini peran perempuan pemimpin dan gereja ada dalam satu tataran ide yang sama. Mengapa peran perempuan pemimpin dan gereja di aras kepemimpinan Nasional dikatakan ada pada tataran yang sama? Ada tiga (3) alasan utama. Pertama, perempuan pemimpin dan gereja sama-sama masih berperan ditingkat formalitas di dalam kepemimpinan nasional. Kedua, perempuan pemimpin dan gereja sama-sama merupakan bagian dari kelompok minoritas dalam kepemimpinan nasional. Ketiga, perempuan pemimpin dan gereja sama-sama memiliki potensi besar di aras kepemimpinan nasional apabila mampu menjalankan fungsinya secara optimal. Partisipasi politik perempuan dan gereja merupakan manifestasi pemenuhan hak sebagai warga Negara Indonesia.

Penekanan peran perempuan pemimpin dalam tulisan ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk menomor-duakan peran laki-laki dan kelompok seksual selain laki-laki dan perempuan. Penekanan peran perempuan pemimpin dalam tulisan ini harus dilihat sebagai bentuk keprihatinan yang melahirkan panggilan untuk bersuara tentang pentingnya perempuan dengan kualitas kepemimpinannya ikut campur

dalam kepemimpinan nasional. Anggota gereja termasuk di dalamnya perempuan sebagai warga negara memiliki hak untuk melakukan perbaikan di ranah politik agar perempuan dan kelompok minoritas lain tidak diperlakukan secara diskriminatif.⁵

Memperhatikan perubahan kepemimpinan nasional yang terjadi melalui peristiwa PEMILU di tahun 2014, patut diakui bahwa ada angin segar dalam pengakuan terhadap pentingnya peran perempuan pemimpin. Ada peningkatan 100 % dalam jumlah menteri perempuan dalam Kabinet Kerja Jokowi-JK dibandingkan dengan kabinet sebelumnya, dari empat (4) orang menjadi delapan (8) orang. Satu (1) diantara mereka adalah Yohana Susana Yembise, yang diangkat sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan disebut oleh Presiden Joko Widodo sebagai Menteri perempuan pertama dari Papua. Bertambahnya jumlah perempuan pemimpin dalam Kabinet Kerja harus ditanggapi secara positif sebagai pintu yang memungkinkan meningkatkan kebijakan-kebijakan yang berwawasan gender di bumi nusantara.⁶

Tulisan ini akan membahas tiga (3) hal secara berurutan. Pertama, telaah teoritis tentang etika feminis. Kedua, analisa terhadap peran gereja dan perempuan pemimpin dalam perspektif etika feminis. Ketiga, refleksi terhadap masa depan gereja dan perempuan pemimpin di tingkat kepemimpinan nasional.

Keunikan Etika Feminis

Agenda utama dari gerakan feminisme adalah keprihatinan atas perlakuan tidak adil terhadap perempuan di manapun dan kapanpun; sedangkan agenda utama dari etika adalah menyatakan apa yang baik, benar dan tepat. Gerakan feminisme selalu memiliki karakter etika di dalamnya, khususnya dalam usaha untuk membawa keadilan bagi perempuan dan kaum marginal lainnya. Gerakan feminis lahir dari kesadaran akan kokohnya budaya patriarkhi yang menekan perempuan dalam berbagai lini kehidupannya. Dengan kata lain, gerakan feminis adalah gerakan pembebasan yang dibangun di atas dasar pengalaman perempuan.

Etika feminis dibangun di atas pengakuan bahwa pengalaman setiap perempuan adalah unik dan berharga. Etika feminis memiliki setidaknya tiga (3) ciri utama yaitu: pengakuan terhadap perempuan sebagai agen moral, kesatuan sumber dalam pengambilan keputusan etis serta integrasi antara yang personal dan yang politis, relasi/keterhubungan etis demi

keutuhan ciptaan.⁷

Pertama, pengakuan terhadap perempuan sebagai agen moral. Pengakuan bahwa perempuan diciptakan oleh Allah menurut gambarNya, sesuai dengan dogma gereja, harusnya menjadi alasan dasar bagi penolakan terhadap tindakan objektifikasi perempuan. Wilma Jakobsen, seorang pemerhati etika feminis, menegaskan bahwa:

*We live in a society which has continually treated women as inferior or as minors under law. It is therefore imperative for feminist ethics to affirm that women are fully able to make moral decisions as autonomous moral agents.*⁸

Menerima perempuan sebagai agen moral berarti mengakui kemampuannya untuk mengambil keputusan oleh dan bagi dirinya sendiri tanpa tuntutan atau tekanan dari pihak lain (laki-laki) di sekitarnya. Landasan Alkitabiah dari pengakuan terhadap atas posisi perempuan (dan laki-laki) yang adalah agen moral, dapat ditemukan dalam kisah penciptaan, yaitu Kejadian 1 dan 2. Di dalam kisah Penciptaan, dijelaskan bahwa manusia dalam hal ini, Adam dan Hawa merupakan *imago dei*. Apa makna dari menjadi *imago dei*? Mengakui perempuan sebagai *imago dei* berarti meyakini bahwa dalam hubungan yang intim dengan Allah, perempuan dimampukan untuk menjadi agen moral; di dalam persekutuan dengan Allah dan sesama ciptaan, perempuan memiliki kontribusi khusus; dan di dalam tanggungjawab untuk mengelola dan memelihara ciptaan, perempuan dipercaya untuk menentukan sikap dan mengambil keputusan demi menjaga keutuhan ciptaan.

Kedua, kesatuan sumber dalam pengambilan keputusan etis serta integrasi antara yang personal dan yang politis. Etika feminis mengakui bahwa seluruh pengetahuan perempuan, termasuk pengetahuan moralnya, berakar pada integrasi antara tubuh dan jiwanya.⁹ Etika feminis mengafirmasi perasaan sebagai bagian penting dari pengalaman moral karena di dalam pengalaman perempuan, kisah tubuh, jiwa, perasaan membentuk kesatuan yang membuktikan keberhargaannya.¹⁰ Pengalaman perempuan, termasuk perempuan pemimpin adalah unik karena pengalamannya dipengaruhi bukan hanya oleh struktur politik dan struktur sosila disekitarnya tetapi juga oleh caranya mempersepsikannya.

Ciri khas yang ketiga dari etika feminis adalah pentingnya keterhubungan dalam pengambilan keputusan etis demi keutuhan ciptaan. Keputusan yang etis tidak dapat dibuat dalam isolasi, dan agen

moral bekerja paling efektif dalam relasi dengan yang lain.¹¹ Pada akhirnya, etika feminis mengafirmasi kedudukan perempuan sebagai gambar Allah yang mampu mengambil keputusan etis. Dalam menghadapi berbagai permasalahan ketidakadilan dan diskriminasi terhadap perempuan, etika feminis mengutamakan pengalaman perempuan, sebagai ciptaan yang utuh, yang setara dengan laki-laki dalam masyarakat.

Peran Gereja dalam Kepemimpinan Nasional: Ekumenikal, Konfesional dan Misional

Jika istilah etika di tingkat paling dasar menunjuk kepada usaha untuk menjadi baik, benar dan tepat maka bagi gereja (baca: anggota gereja) usaha tersebut hanya dapat dicapai di dalam Tuhan dan hubungan denganNya. Iman dan etika tidak dapat dipisahkan.¹² Tidak ada individu yang dapat mencapai kehidupan yang etis sendirian, ia membutuhkan ciptaan Allah yang lain disekitarnya. Walaupun usaha untuk mencapai kehidupan yang baik dimulai dari keinginan untuk memenuhi kebaikan diri sendiri sekalipun, usaha tersebut hanya akan berakhir baik apabila individu menyadari pentingnya kehadiran sesama yang dipengaruhi dan mempengaruhi pengambilan keputusan dan tindakannya. Kehidupan bersama anggota gereja, termasuk di dalamnya perempuan pemimpin, hanya dapat mencapai kualitas baik, benar dan tepat ketika ia mampu menjalankan fungsi kekristenannya dengan baik, benar dan tepat pula. Dalam konteks pergumulan ini, gereja memiliki tiga (3) peran utama yaitu ekumenikal, konfesional dan misional.¹³

Gereja ekumenikal adalah gereja yang anggotanya meyakini bahwa keistimewaan gereja di dunia adalah kemampuan dan kapasitasnya untuk melahirkan persekutuan antara ciptaan dan Sang Pencipta. Panggilan untuk menjadi "umat Allah" di dalam gereja ekumenikal menunjuk kepada usaha untuk menomor-duakan segala bentuk pembatas atau pembeda, seperti denominasi, doktrin, latar belakang sosial budaya, dan bahkan waktu dan tempat demi terciptanya "komunitas tanpa batas."¹⁴ Contoh nyata dari gereja ekumenis dapat ditemukan dalam "sejarah awal kekristenan dimana gereja-gereja Yunani, Siria, Armenia, dan Koptik bertumbuh tidak dengan orientasi pemikiran bahwa gerejanya ada hanya bagi orang Yunani, Siria, Armenia dan koptik, tetapi sebagai perwujudan iman Kristen diseluruh dunia."¹⁵

Ketika anggota gereja mampu untuk mengekspresikan imannya secara ekumenis maka "pemikiran mereka terbuka serta iman mereka dikuatkan oleh pengetahuan tentang bagaimana saudara-saudarinya

menjalankan kehidupan Kristen.”¹⁶ Anggota gereja yang ekumenikal di Indonesia adalah jemaat yang imannya memungkinkan ia untuk menghormati sesama, siapapun sesamanya itu, walaupun ada perbedaan (pendapat, agama, budaya, keyakinan) diantara mereka. Individu yang adalah bagian dari gereja ekumenikal dalam kajian etika feminis adalah individu yang telah menemukan bahwa imannya kepada Kristus menguatkannya untuk menemukan, mengeksplorasi dan menghormati perbedaan sebagai bagian dari kreasi Allah di dunia. Inilah ciri yang diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangsih anggota gereja dalam kepemimpinan nasional.

Sejalan dengan perkembangan waktu, sejarah perkembangan gereja menunjukkan bahwa gereja berkembang dari penekanan pada keutuhan dan persekutuan umat Allah di seluruh dunia kepada keutuhan dan persekutuan umat Allah berdasarkan pengakuan iman yang sama.¹⁷ Pengakuan iman adalah pernyataan iman dari anggota gereja yang sejati. Mengapa demikian? Karena pengakuan iman adalah kesimpulan dari seluruh ajaran gereja. Pengakuan iman jemaat yang kemudian berkembang menjadi bagian penting dari institusi gereja. Willian J. Abraham, seorang teolog Kristen, menjelaskan bahwa gereja yang konfesional dipanggil untuk menjadikan Yesus Kristus sebagai pusat nilai etis dan kesetiannya baik di dalam maupun di luar gereja.¹⁸

*This confession is seen not only as central to the faith down through the ages, but as precisely that element in the faith which at this moment in history needs to be resolutely reasserted and reappropriated. Such a confession calls for the repudiation of Christological alternatives that are sub-Christian or post-Christian in nature; and it requires a positive embrace of the teaching of the church's Savior and Lord as an alternative to the moral commitments of the culture.*¹⁹

Kekuatan utama dari gereja konfesional adalah memberi kesempatan kepada setiap pengakunya untuk melakukan evaluasi atas keyakinan imannya tidak hanya dengan introspeksi tetapi terutama dengan menunjukkan aksi sebagai bukti kepercayaannya kepada Kristus. Anggota gereja konfesional bercirikan pengakuan atas diri Yesus Kristus sebagai Tuhan dan pengakuan tersebut berdampak dalam kehidupannya. Oleh karena itu anggota gereja yang konfesional berperan dalam mendorong kepemimpinan nasional yang etis dengan membuktikan pengakuan imannya kepada Kristus.

Cara yang ketiga untuk memahami fungsi etis gereja di dalam

pergerakan kepemimpinan nasional adalah dengan memahami gereja sebagai persekutuan beriman yang menghidupi imannya melalui tindakan atau misional. Ciri khas dari anggota gereja misional adalah ia memiliki kesadaran yang mendalam atas perbedaan antara satu individu dan individu yang lain dalam menjalankan pengakuan imannya kepada Allah.²⁰ Gereja yang misioner bertindak melawan ketidakbenaran dan ketidakadilan sebagai bentuk nyata dari pengakuan imannya.

Perbedaan antara gereja yang ekumenikal, konfesional dan misional jelas terlihat. Berbagai aliran dan denominasi yang ada di Indonesia melahirkan dan mengarahkan gereja kepada salah satu atau lebih dari ciri ini. Gereja di Indonesia hendaknya berusaha untuk sekaligus menjadi ketiganya, atau memiliki ketiga kualitas dari ketiga tipe gereja yang telah dijabarkan di atas agar ia mampu memainkan tanggungjawabnya sebagai warga kerajaan Allah sekaligus warga Negara Indonesia. Gereja di Indonesia, dalam mengembangkan perannya yang ekumenikal, konfesional dan misional harus bergerak dari fungsi formal, simbolis dan deskriptif kepada fungsi substantif.

Maria dan Martha: Dua Perempuan Pemimpin yang Berbeda

Maria dan Martha adalah dua (2) sosok perempuan yang populer pada masa Yesus. Kisah Maria dan Martha dan Injil Yohanes 11, mungkin bukanlah bagian Alkitab pertama yang akan dituju ketika pembaca ingin membaca cerita perempuan pemimpin. Inilah yang membuat kepemimpinan Maria dan Martha unik, kisah mereka memberikan makna baru bagi kata “perempuan pemimpin.”

Menghadapi kematian saudara laki-lakinya, Maria dan Martha memiliki reaksi duka yang berbeda. Saat Yesus menemui Maria, ia nampak pasif (setelah ia dipanggil baru ia menemui Yesus), ia besimpuh di kakinya dan menyampaikan perasaannya tentang Yesus dan saudaranya yang meninggal. Martha di sisi lain berperan aktif dengan menemui Yesus, tanpa dipanggil, dan bahkan membangun diskusi teologi dengannya disekitar konsep kehidupan, kematian dan identitas Yesus sebagai Mesias. Tidak sulit untuk memilih Martha sebagai sosok perempuan pemimpin dalam kisah Yohanes 11. Yang menarik adalah sejarah penafsiran Alkitab terhadap kisah Maria dan Martha cenderung menunjuk Maria sebagai teladan yang sikapnya dibenarkan oleh Yesus. Mary Stromer Hanson, dengan tegas menolak cara menafsir ini dengan memberikan alternatif penafsiran yang transformatif. Menurutnya, baik Maria maupun Martha adalah pemimpin perempuan yang berbeda perannya. Maria adalah

pemimpin yang berperan untuk mengumpulkan orang Yahudi, yang nantinya akan menjadi saksi mujizat yang Yesus lakukan.²¹ Hanson menegaskan:

*"She is certainly not very vocal, and, when she does speak once, it is not her own spontaneous speech. Looking closer, I conclude that Mary is the reason for the Jews coming out to Bethany to meet Jesus and to witness the subsequent miracle. In 11:42, although Mary is not mentioned at this point, Jesus' prayer spoken aloud to the Father proclaims, "For the sake of the crowd, so that they may believe that you sent me.""*²²

Mujizat yang dilakukan Yesus bagi saudara laki-laki Maria dan Martha mendapatkan konteksnya karena peran Maria. Jika Maria adalah pemimpin yang membawa orang Yahudi pada pengenalan akan siapa Yesus, maka Martha adalah pemimpin yang membawa "mereka yang sudah percaya" untuk semakin mengimani Yesus termasuk anggota gereja di masa kini.

Sebagai pemimpin, Maria dan Martha bertanggungjawab atas kelompok pengikut yang berbeda. Maria dengan kelompok yang membutuhkan tanda mujizat untuk percaya, sementara Martha dengan kelompok yang sudah percaya dan mampu mendialogkan kepercayaannya itu dalam diskusi teologis yang mendalam. Kisah Maria dan Martha dalam Yohanes 11 membuktikan bahwa ada berbagai model kepemimpinan perempuan. Terpaku pada standar model kepemimpinan mungkin akan melahirkan lapisan diskriminasi baru bagi perempuan. Mengapa? Karena perempuan pemimpin "dipaksa" untuk menyesuaikan diri dengan model kepemimpinan laki-laki sebagai standar baku kepemimpinan yang baik. Maria dan Martha adalah bukti perbedaan kualitas kepemimpinan perempuan yang transformatif.

Bergerak Dari *Standing For* Kepada *Acting For*

Dimana posisi gereja dan perempuan pemimpin saat ini dalam kancah kepemimpinan nasional? Apakah peran ekumenis, konfesional dan misionaris gereja telah terwakilkan dengan baik di Indonesia? Bagaimana dengan peran perempuan pemimpin sebagai agen moral yang otonom? Hanna Pitkin, seorang ahli ilmu politik, mengelompokkan keterwakilan ke dalam empat (4) kelompok yaitu formal, simbolis, deskriptif (*standing for*) dan substantif (*acting for*).²³ Sebagaimana diamanatkan dalam kajian etika feminis, baik gereja maupun perempuan pemimpin harus bergerak dari fungsinya yang masih bersifat formal,

simbolis, dan deskriptif kepada fungsi substansial. "Representasi substantif merupakan konsep keterwakilan yang menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh seorang wakil adalah untuk kepentingan yang diwakilinya."²⁴ Mampukah gereja dan perempuan pemimpin mencapai fungsi substantifnya dalam isu kepemimpinan nasional? Harus! Karena hanya dengan demikian ia menemukan jati dirinya dan menjadi dirinya. Hanya melalui transformasi dari *standing for* kepada *acting for*!

Daftar Pustaka

Buku

- Villa-Vicencio, C. and De Gruchy, John. 1994. *Doing Ethics in Context*. New York: Orbis Books.
- Cannon, Katie Geneva. 2011. *Womanist Theological Ethics*. Louisville: John Knox Press.
- Malone, Mary T. 2003. *Women and Christianity: Volume I*. New York: Orbis Books.
- *Women and Christianity: Volume II*. New York: Orbis Books.
- *Women and Christianity: Volume III*. New York: Orbis Books.
- Van Wijk-Bos, Johanna W. H. 1991. *Reformed and Feminist: A Challenge to the Church*. Louisville: John Knox Press.
- Grady, J. Lee. 2000. *10 Lies the Church Tells Women*. Florida: Charisma House.
- Stuckelberger, Christoph and Mugambi, Jesse N. K. 2007. *Responsible Leadership: Global and Contextual Ethical Perspective*. Switzerland: WCC Publications.
- Lovin, Robin, W. 2000. *Christian Ethics: An Essential Guide*. Nashville: Abingdon Press.
- Barth-Frommel, Marie, Claire. 2003. *Hati Allah Bagaikan Hati Seorang Ibu*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Fiorenza, Schussler Elizabeth. 1997. *Untuk Mengenang Perempuan Itu*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Russel, Letty M. 1993. *Church In The Round: Feminist Interpretation of the Church*. Louisville: John Knox Press.
- *Perempuan dan Tafsir Kitab Suci*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Harrison, Beverly Wildung. 1985. *Essays in Feminist Social Ethics: Making the Connections*. Boston: Beacon Press.

Modul

Modules on Asian Feminist Theologies. "Leadership, Power, Authority."
Yogyakarta:
AWRC. 2013.

Jurnal (print)

- Adriana Venny. 2004. "Kebangkitan Politik Perempuan", *Jurnal Perempuan* 35 (Mei).
- Nuri Soeseno. 2-14. "Perempuan Politisi dalam Partai Politik Pemilu 2014: Keterwakilan Deskriptif vs Substantif. *Jurnal Perempuan* 81 Vol. 19 No. 2 (Mei).
- Rocky Gerung. 2014. "Etika Feminis Melawan Stigma Teokrasi-Patriarki: Refleksi Pemilihan Presiden 2014", *Jurnal Perempuan* 82 Vol.19 No. 3 (Agustus).
- Philips J. Vermonte. 2014. "Rekayasa Politik untuk Perempuan dalam Tata Kelola Pemerintahan", *Jurnal Perempuan* 83 Vol. 19 No. 4 (November).
- Ryan Sugiarto. 2014. "Genealogi Ratu Nusantara: Sejarah, Mitos, dan Politik Negara Modern", *Jurnal Perempuan* 83 Vol. 19 No. 4 (November).

Jurnal (online)

- Mimi Haddad. 2009. "Scripture Affirms Women's Leadership in All Spheres", *Mutuality* (Summer).
- Hans Kung. 1999. "A Global Ethics in World Politics", *International Journal of Politics, Culture and Society*, Vol. 13 No. 1.
- Mary Stromer Hanson. 2012. "Mary and Martha: Models of Leadership in John 11", *Priscilla Papers* Vol. 26 No. 2 (Spring).

Endnote

1. Ryan Sugiarto, "Genealogi Ratu Nusantara: Sejarah, Mitos dan Politik Negara Modern," *Jurnal Perempuan* 83, Vol. 19 No. 4 (2014): 38.
2. Sugiarto, "Genealogi Ratu Nusantara: Sejarah, Mitos dan Politik Negara Modern," 40.
3. Istilah perempuan pemimpin dipilih dan bukan pemimpin perempuan dengan tujuan untuk menggambarkan kesadaran atas peran perempuan yang terpilih sebagai anggota parlemen atau pejabat yang seringkali masih dipandang sebagai *proxies* atau *puppet* dari kekuasaan tangan laki-laki (ayah, suami, dll). Perempuan dibujuk untuk mencalonkan diri sebagai pejabat public agar laki-laki tidak kehilangan control atau kekuasaan (Baca Nur Iman Subodo, *Jurnal Perempuan* 83 Vol. 19 No. 4, 2014).
4. Peran gereja sebagai institusi keagamaan telah dibahas secara mendalam dalam

tulisan Pdt. Dr. Ebenhaizer Nuban Timo yang berjudul “Nasionalisme Indonesia: Sebuah Kajian Antropologis-Historis mengenai Partisipasi Gereja dalam Mengisi dan Mengkritisi Pergerakan Nasional Indonesia” dan dimuat dalam Pax Humana Vol. III, No. 3, September 2014.

5. Partini, “Partisipasi Politik perempuan Dalam Praktik Kewarganegaraan di Indonesia,” *Jurnal Perempuan* 81, Vol. 19 No. 2 (2014): 29.
6. Philip J. Vermonte dalam tulisannya yang berjudul “Rekayasa Politik untuk Perempuan dalam Tata Kelola Pemerintahan” menyebutkan bahwa meningkatnya jumlah perempuan dalam kabinet kerja adalah situasi yang *necessary but not sufficient*. Meningkatnya jumlah perempuan di dalam kabinet saja tidak cukup untuk mempromosikan *less gender discriminatory governance* (Baca Philip J. Vermonte, *Jurnal Perempuan* 83 Vol. 19 No. 4, 2014).
7. C. Villa-Vicencio and John De Gruchy, *Doing Ethics in Context* (New York: Orbis Books, 1994), 151-152.
8. Villa-Vicencio, *Doing Ethics in Context*, 151.
9. Ibid.
10. Villa-Vicencio, *Doing Ethics in Context*, 152.
11. Ibid.
12. Robin W. Lovin, *Christian Ethics: An Essential Guide* (Nashville: Abingdon Press, 2000), 7.
13. Lovin, *Christian Ethics: An Essential Guide*, 84.
14. Lovin, *Christian Ethics: An Essential Guide*, 85.
15. Ibid.
16. Lovin, *Christian Ethics: An Essential Guide*, 87.
17. Lovin, *Christian Ethics: An Essential Guide*, 88.
18. Lovin, *Christian Ethics: An Essential Guide*, 92.
19. Ibid.
20. Lovin, *Christian Ethics: An Essential Guide*, 94.
21. Mary Stromer Hanson, “Priscilla Papers,” Vol. 26 No. 2 (2012): 8.
22. Ibid.
23. Nuri Soeseno, “Perempuan Politisi dalam Partai Politik Pemilu 2014: Keterwakilan Deskriptif vs Substantif,” *Jurnal Perempuan* 81, Vol. 19 No. 2 (2014): 115.
24. Ibid.

Dari Standing For kepada Acting For: Kajian Etika Feminis atas Peran Gereja dan Perempuan Pemimpin di Indonesia

Urgensi Demokrasi Deliberatif bagi Kepemimpinan Nasional

Gusti A. B. Menoh

Abstrak

This writing aims to showing the urgency of deliberative democraton for leadership in Indonesian country, especially in the area of nation state (also religiosity). The political philosophy of Jurgen Habermas is urgent because after organizing the democracy for many years, Indonesia didn't make progress precisely setback on implementation of democracy . Deliberative democracy is a theory that recognize rational deliberation (discourse) between the citizen as the resource of legitimation of politically. In practice, deliberative democraton, require the state (the leader: executive, judicative, and legislative) no longer lays down the law and political decision in splendid isolation, but always open to voice that arise from public over many media an organization that vocally and in civil society who played influence over politics system (the leader: executive, judicative, and legislative). Habermas said that deliberative politic get the power of legitimation from structure of opinion discursive and the formation of will that able to fullfill of its integration function as social only because citizen hope that the result have a rational quality. If deliberation democracy to be a reference of national leadership, so that the dreams to realized the strong and welfare of national state otomatically was real. In other word, the leadership problem that we feel right now as the heritage for along time years of feodal leadership, top down, otoritarian, not responsible, must be left . On the contrary, the leadership must wise up that their leadership resource, are the citizen so must be always open the communication sphere with and responsible to them.

Keywords: *Jürgen Habermas, deliberative democraton, public sphere, politic, national leadership, church leadership, Indonesia.*

1. Pendahuluan

Dinamika politik nasional kini (2014, Red) kian seru. Sementara pemerintah (kabinet kerja) sudah memulai kerjanya, panggung politik di Parlemen masih penuh pertarungan saling menegasi dan mengalahkan di

antara dua kubu: Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat. Tugas pokok DPR berupa legislasi, pengawasan, dan *budgeting* masih jauh dari sentuhan karena urusan memenangi setiap pertarungan menjadi ambisi utama masing-masing pihak. Parlemen sebagai *locus* diskursus berbagai persoalan kehidupan berbangsa dan bernegara belum terlaksana. Akibatnya, antara parlemen dan kehidupan berbangsa dan bernegara seakan tak saling terhubung. Sementara masyarakat sudah melupakan pertarungan pilpres tempo hari, kondisi politik di tingkat elite masih mengalami keterbelahan.¹

Situasi ini menunjukkan betapa warisan politik era Demokrasi Parlemerter masih begitu kuat walaupun kita menganut sistem presidensial. Kenyataannya, elite politik di Parlemen senang sekali mengubah UU politik atau pun Tata Tertib Dewan, bergantung pada kepentingan jangka pendek mayoritas koalisi di Parlemen dan bukan kepentingan jangka panjang menata politik Indonesia ke arah yang lebih terkonsolidasi dan menuju kedewasaan politik. Sebagai contoh, UU parpol atau UU Pemilu dibuat atau diamandemen tiap lima tahun hanya untuk menemukan kompromi politik antara partai besar dan partai kecil. UU Pilkada yang dianulir oleh PERPPU disebabkan kepentingan sempit mayoritas partai koalisi pendukung Prabowo ketimbang untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan pemerintahan daerah. Pembuatan Tata Tertib Dewan, khususnya terkait tata cara penentuan pimpinan DPR dan alat-alat kelengkapan Dewan, juga lebih didasari oleh kekuatan politik ketimbang asas kekeluargaan, kebersamaan, dan keadilan di parlemen.² Secara khusus, dengan diberlakukannya pilkada secara tak langsung, ini menunjukkan bahwa dalam berdemokrasi bangsa kita mengalami *aborted progress*, yakni kemajuan yang mengalami keguguran atau digugurkan oleh subjektivitas orang-orang yang terlibat di dalamnya, khususnya mereka yang mengambil keputusan (legislatif). Kecenderungan ini mengakibatkan gagalnya perkembangan menuju tahapan yang lebih maju karena prosesnya melingkar-lingkar ke dalam dengan kerumitan semakin tinggi, tetapi hanya menghasilkan gerak di tempat.³

Dalam kondisi ini, gagasan demokrasi deliberatif Jurgen Habermas (1929-...) perlu dipertimbangkan sebagai rambu-rambu agar *trias politica* (legislatif, eksekutif, yudikatif plus *public sphere*) sebagai penyangga negara hukum demokratis Indonesia tidak runtuh atau jatuh ke otoritarianisme kekuasaan elite tertentu (legislatif). Intensi teori demokrasi deliberatif jelas: ia ingin menegaskan pentingnya *prosedur komunikasi* untuk meraih *legitimitas hukum* dalam masyarakat modern